

**PENGARUH REALISASI BELANJA DAERAH
DAN ANGKATAN KERJA TERHADAP
OUTPUT DAN PENDAPATAN PER KAPITA
(Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**NISA MAHARANI S.
NIM. C2B007041**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2011**

Motto dan Persembahan

“You write what You read”

“Percayalah pada kekuatan dirimu sendiri”

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Mama dan Papa tercinta yang tak pernah lelah membimbing dan menjagaku dengan penuh kasih sayang...

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Nisa Maharani S.
Nomor Induk Mahasiswa : C2B007041
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/IESP
Judul Skripsi : **PENGARUH REALISASI BELANJA
DAERAH DAN ANGKATAN KERJA
TERHADAP OUTPUT DAN PENDAPATAN
PER KAPITA
(Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah)**
Dosen Pembimbing : Dr. H. Hadi Sasana, S.E., M.Si.

Semarang, 13 Desember 2011

Dosen Pembimbing,

(Dr. H. Hadi Sasana, S.E., M.Si.)

NIP. 196901211997021001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Nisa Maharani S.
Nomor Induk Mahasiswa : C2B007041
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/IESP
Judul Skripsi : **PENGARUH REALISASI BELANJA
DAERAH DAN ANGKATAN KERJA
TERHADAP OUTPUT DAN PENDAPATAN
PER KAPITA**
(Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah)

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 23 Desember 2011

Tim Penguji:

1. Dr. H. Hadi Sasana, SE, M.Si (.....)
2. Dra. Herniwati RH, MS. (.....)
3. Evi Yulia P. SE, M.Si (.....)

Mengetahui, Desember 2011

Pembantu Dekan I

(Anis Chariri, SE., M.Com., Akt., Ph.D.)
NIP. 19670809 199203 1001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Nisa Maharani S., menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **PENGARUH REALISASI BELANJA DAERAH DAN ANGKATAN KERJA TERHADAP OUTPUT DAN PENDAPATAN PER KAPITA MANUSIA (Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah)**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Sengan ini saya menyatakan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sdisengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 13 Desember 2011
Yang membuat pernyataan,

(Nisa Maharani S.)
NIM : C2B007041

ABSTRAK

Pendapatan per kapita sering digunakan untuk mengukur kemakmuran ekonomi di suatu daerah, yaitu seberapa banyak barang dan jasa yang tersedia bagi rata-rata penduduk untuk melakukan kegiatan konsumsi dan investasi. Faktor yang mempengaruhi pendapatan per kapita adalah output dan jumlah penduduk dan faktor-faktor yang mempengaruhi output yaitu belanja daerah dan angkatan kerja.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh realisasi belanja daerah dan tenaga kerja terhadap output dan pendapatan per kapita. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2005-2009. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan langsung yang positif antara variabel realisasi belanja tidak langsung, belanja langsung, dan tenaga kerja terhadap output. Begitu juga dengan hubungan output terhadap pendapatan per kapita. Namun terdapat pengaruh langsung yang negatif antara variabel tenaga kerja terhadap pendapatan per kapita.

Kata kunci: belanja daerah, tenaga kerja, pendapatan per kapita, output, analisis jalur

ABSTRACT

Income per capita is often used to measure the economic prosperity in a region, how many goods and services available to the average population for consumption and investment activities. Factors affecting the income per capita is the output and population and the factors that affect the output of local spending and the labor force.

This study aims to analyze the effect of regional expenditure and labor on output and income per capita. The research was conducted in Central Java Province during the period 2005-2009. In this study used path analysis.

The results showed that there are a direct positive relationship between the variable realization of indirect spending, direct spending, and labor on output. So is the relationship of output to income per capita. But there is a negative direct influence between variable labors to income per capita.

Key words: *regional expenditure, labor, income per capita, output, path analysis*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya serta kekuatan lahir dan batin kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulisan skripsi dengan judul “*Pengaruh Realisasi Belanja Daerah dan Angkatan Kerja terhadap Output dan Pendapatan Per Kapita (Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah)*” ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan guna menyelesaikan program sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, Msi. Akt. Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Dr. H. Hadi Sasana, SE., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan arahan, motivasi, dan dukungan selama penulisan skripsi.
3. Ibu Dra. Tri Wahyu Rejekiingsih, MSi selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan sepenuhnya kepada penulis.
4. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Papa (H. Bambang Sulisty, SH., MM.), Mama (Hj. Siti Farida, SH.), dan Kakak (Muhammad Faried S., ST.) yang selalu memberikan motivasi,

dukungan, semangat, kasih sayang, serta doa agar penulis dapat menjadi seorang yang sukses.

6. Teman-teman IESP 2007, keluarga sumber rejeki, dan sahabat-sahabatku tercinta Mbak Okta, Riris, Medi, Fadillah, Ulfi, Akrom, Abi, Papi, Angga, Indro, Wiwit, Oho, Danta, Puput, Mei-mei, Mbak Shascya, Maya, Tesa, Pipit, Dita, Yudhi, dan Ega begitu bahagia memiliki kalian. Teman, yang selalu mengajarkan kesetiaan dan selalu membuat marah tetapi juga membuat tertawa.
7. Teman-teman KKN PPM II 2010, yang mengajarkan mengerti berbagai karakter indididu, berhubungan langsung dengan masyarakat, kerjasama.
8. Mas Nanang petugas BPS yang membantu mencari data.

Semarang, 13 Desember 2011

Nisa Maharani S.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II TELAAH PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori.....	14
2.1.1 Otonomi Daerah.....	14
2.1.2 Desentralisasi Fiskal	15
2.1.3 Pendapatan Per Kapita	16
2.1.4 Output.....	17
2.1.5 Tenaga Kerja	20
2.1.6 Teori Pengeluaran Pemerintah	22
2.1.7 Hubungan Output dengan Pendapatan Per Kapita	30
2.1.8 Hubungan Tenaga Kerja dengan Output.....	31
2.1.9 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Output	31
2.2 Penelitian Terdahulu	34
2.3 Kerangka Pemikiran.....	39
2.4 Hipotesis.....	40

BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	42
3.2 Jenis dan Sumber Data	44
3.3 Metode Pengumpulan Data	44
3.4 Metode Analisis	45
3.4.1 Spesifikasi Model	45
3.4.2 Asumsi Analisis Jalur	46
3.4.3 <i>Goodness of Fit Model</i>	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	50
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian	50
4.1.1 Keadaan Wilayah	50
4.1.2 Pendapatan Per Kapita	51
4.1.3 Output	53
4.1.4 Realisasi Belanja Daerah	55
4.1.5 Angkatan Kerja	58
4.2 Analisis Jalur	60
4.2.1 Pengujian Asumsi Analisis Jalur	60
4.2.2 Modifikasi Model	62
4.3 Analisis dan Intepretasi	64
BAB V PENUTUP	69
5.1 Simpulan	69
5.2 Keterbatasan	69
5.3 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pendapatan Per Kapita Tanpa Migas Atas Dasar Harga Berlaku di Pulau Jawa Tahun 2005-2009	4
Tabel 2.1 Klasifikasi Belanja Berdasarkan PP 24/2005 dan Pemendagri No.59/2007.....	24
Tabel 4.1 Pendapatan Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2009	52
Tabel 4.2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2009	54
Tabel 4.3 Realisasi Belanja Tidak Langsung Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.....	56
Tabel 4.4 Realisasi Belanja Langsung Pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.....	57
Tabel 4.5 Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.....	59
Tabel 4.6 Uji Normalitas Data	60
Tabel 4.7 <i>Correlation Matrix of Y and X</i>	61
Tabel 4.8 Hasil Pengujian Kelayakan Model	61
Tabel 4.9 <i>Standardize Residuals</i>	62
Tabel 4.10 Hasil Penyujian Kelayakan Model 1	63
Tabel 4.11 Analisis Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pendapatan Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku di Jawa Tengah Tahun 2005-2009	5
Gambar 1.2 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2009.....	8
Gambar 1.3 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Jawa Tengah Tahun 2005-2009.....	9
Gambar 2.1 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah menurut Wagner	29
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis	40
Gambar 4.6 Modifikasi Model 1.....	63

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A DATA MENTAH.....	74
LAMPIRAN B DATA LN_	79
LAMPIRAN C DATA SCREENING	84
LAMPIRAN D NORMAL SCORES	87
LAMPIRAN E HASIL MODEL PERSAMAAN AWAL.....	90
LAMPIRAN F HASIL MODIFIKASI MODEL	100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak era reformasi tahun 1998 di Indonesia, pola hubungan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengalami perubahan, yang sebelumnya menganut era sentralistik yaitu memusatkan seluruh wewenang kepada pusat berubah menjadi era desentralisasi yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001 pelaksanaan otonomi daerah yang merupakan wujud dari diberlakukannya desentralisasi mulai diberlakukan di Indonesia.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Kedua undang-undang di bidang otonomi daerah tersebut telah menetapkan pemberian kewenangan otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah, pemerintah daerah diberi wewenang untuk menggali potensi daerahnya dan menetapkan prioritas pembangunan. Tujuan dari desentralisasi fiskal dan otonomi daerah yaitu mendorong demokratisasi di daerah, mencegah disintegrasi bangsa, meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah, memajukan dan meningkatkan daya saing daerah, mendekatkan pelayanan kepada publik, dan memberdayakan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyerahkan fungsi, personil, dan aset dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Hal ini berarti bahwa tambahan kekuasaan dan tanggung jawab diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan kota, dan membentuk sistem yang jauh lebih terdesentralisasi dibandingkan dengan sistem dekonsentrasi dan koadministratif di masa lalu. Di semua sektor administratif pemerintahan, undang-undang telah memindahkan fungsi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dengan pengecualian dalam hal pertahanan dan keamanan, kebijakan luar negeri, masalah moneter dan fiskal, hukum, dan urusan agama. Provinsi memiliki status ganda sebagai daerah yang otonom dan sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Sebagai daerah otonom, provinsi memiliki kewenangan untuk mengatur urusan-urusan tertentu dimana administrasi dan kewenangan hubungan antar kabupaten dan kota tidak (atau belum) diterapkan oleh kabupaten dan kota. Sebagai perwakilan pemerintah pusat, pemerintah provinsi melakukan tugas administratif tertentu yang didelegasikan oleh presiden kepada gubernur. Kekuasaan kabupaten dan kota meliputi seluruh sektor kewenangan administratif selain kewenangan yang telah dijalankan oleh pemerintah pusat dan provinsi, termasuk pekerjaan publik, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, transportasi, industri dan perdagangan, investasi, lingkungan hidup, urusan tanah, koperasi, dan tenaga kerja. (Mudrajad Kuncoro, 2004).

Ahmad Yani (2009) menjelaskan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan sumber penerimaan yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah : Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Pemberian dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi adanya disparitas fiskal vertikal (antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah) dan horizontal (antar pemerintah daerah), sekaligus membantu daerah dalam membiayai pengeluaran pembangunannya.

Halim (2001) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi dan desentralisasi, yaitu:

1. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. Artinya daerah harus mampu mengelola keuangan daerahnya baik penerimaan maupun pengeluarannya, dimana penerimaan yang diperoleh daerah kemudian dialokasikan sebagai pembiayaan belanja daerahnya.

2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar (Dwirandra, 2006). Jadi, PAD harus lebih tinggi dibandingkan Dana Perimbangan yang menandakan daerah tersebut sudah mandiri dan tujuan dari otonomi daerah dan desentralisasi tercapai.

Indikator pendapatan per kapita merupakan indikator yang sering digunakan untuk mengukur kemakmuran suatu daerah. Dari Tabel 1.1 dapat dilihat pendapatan per kapita di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut.

Tabel 1.1
Pendapatan Per Kapita Tanpa Migas
Atas Dasar Harga Berlaku di Pulau Jawa Tahun 2005-2009 (Ribu Rupiah)

Provinsi	Tahun				
	2005	2006	2007	2008	2009
DKI Jakarta	48.570	55.610	62.199	73.713	81.746
Jawa Barat	9.468	11.280	12.434	13.987	15.121
Jawa Tengah	6.372	7.565	8.419	9.543	10.416
DI Yogyakarta	7.529	8.652	9.584	10.985	11.830
Jawa Timur	11.033	12.796	14.456	16.635	18.285
Banten	9.329	10.585	11.408	12.756	13.598

Sumber: PDRB Provinsi di Indonesia Menurut lapangan Usaha 2005-2009

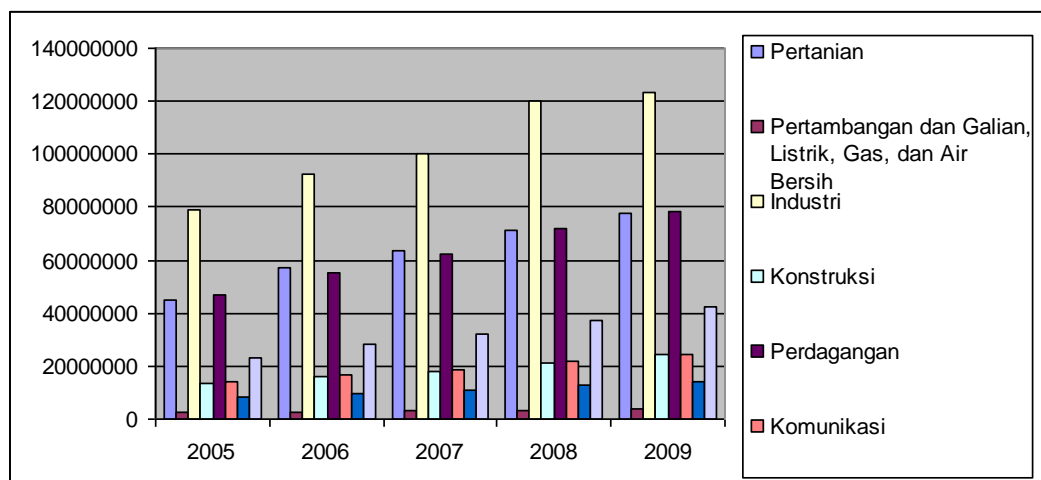
Dari Tabel 1.1 diketahui bahwa dari enam provinsi di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Tengah memiliki pendapatan per kapita terendah dibandingkan dengan provinsi di Pulau Jawa lainnya walaupun setiap tahun mengalami kenaikan tetapi nilai absolut masih lebih rendah dibandingkan provinsi lain.

Dari fenomena tersebut jelaslah bahwa sumber daya yang dimiliki suatu daerah sangat mempengaruhi pendapatan hingga pendapatan per kapita dari suatu daerah. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah atau provinsi dalam periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) atau output, baik atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam dalam suatu wilayah, atau jumlah seluruh unit barang dan jasa yang dihasilkan di suatu daerah.

Output (PDRB) di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 1.1 yang mengalami peningkatan disetiap tahunnya sebagai berikut.

Gambar 1.1
Pendapatan Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku di Jawa Tengah Tahun 2005-2009 (juta rupiah)



Sumber: BPS, diolah

Gambar 1.1 menggambarkan bahwa dari tahun 2005-2009 sektor industri pengolahan memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Jawa Tengah. Kondisi dan potensi yang berbeda-beda dari masing-masing daerah, menyebabkan perbedaan kemampuan daerah dalam menjalankan kewenangannya tersebut. Pemerintah pusat memberikan transfer pada pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan guna mengurangi kesenjangan antar daerah, yang terdiri dari (1) Dana Alokasi Umum (DAU), (2) Dana Alokasi Khusus (DAK), (3) Dana Bagi Hasil (DBH). Tujuan diberikannya transfer yaitu untuk menjamin tercapainya

standar pelayanan publik di setiap daerah. Transfer pemerintah merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat yang bertujuan sebagai stimulus untuk menggali potensi lokal yang ada. Transfer pemerintah pusat menjadi insentif bagi daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Namun, disisi lain adanya dana perimbangan justru membuat suatu daerah bergantung dan tidak menggali potensi yang ada di daerahnya.

Todaro (1997:18) menyebutkan bahwa pemerintah harus diakui dan dipercaya untuk memikul peranan besar di dalam upaya pengelolaan perekonomian nasional/daerah. Menurut Mangkoesoebroto (1998) Peran pemerintah yang harus dijalankan adalah :

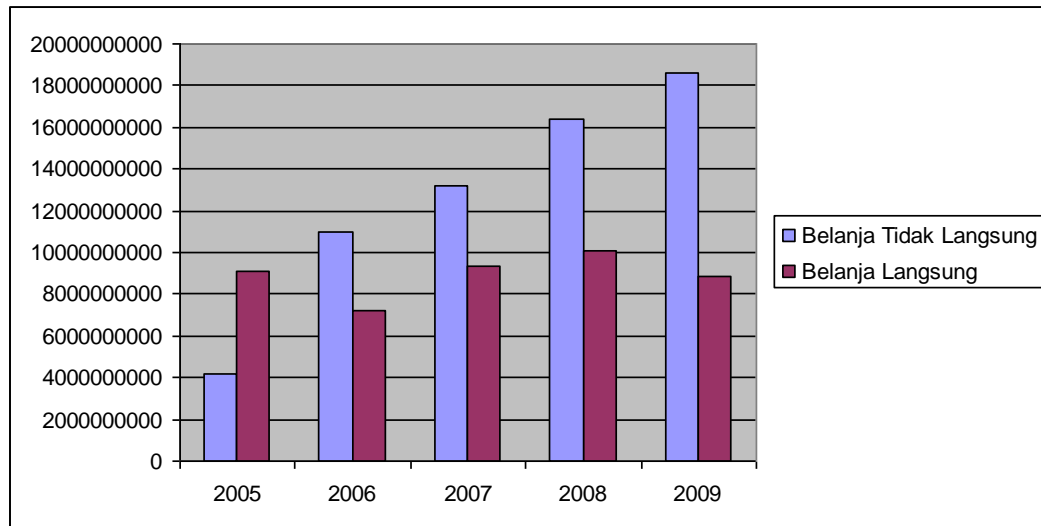
1. Peran alokasi yaitu pemerintah mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien terutama dalam menyediakan barang dan jasa yang tidak diproduksi oleh pihak swasta.
2. Peranan distribusi yaitu memlalui kebijakan fiskal merubah keadaan masyarakat sehingga sesuai dengan distribusi pendapatan yang diharapkan melalui pengenaan pajak progresif yaitu relatif beban pajak yang lebih besar bagi yang mampu dan mendistribusikan bagi yang kurang mampu.
3. Peranan stabilisasi yaitu pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan goncangan ekonomi yang berlebihan.

Kebijakan pengeluaran pemerintah yang secara langsung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi adalah belanja karena variabel ini diwujudkan dalam

bentuk pembangunan prasarana ekonomi dan sosial. Perkembangan pengeluaran pemerintah yang diukur dari besarnya belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pengklasifikasin belanja langsung dan tidak langsung ini digunakan dalam sistem penganggaran pemerintah baik pusat maupun daerah, yaitu sejak penerapan PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yang kemudian direvisi menjadi PP No. 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 sebagai revisi Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam peraturan yang lama sebagaimana diatur dalam Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, belanja daerah diklasifikasikan menjadi belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, belanja modal, belanja tidak tersangka, dan belanja bantuan keuangan. Kemudian, berdasarkan peraturan yang baru klasifikasi belanja dalam sistem anggaran diperbaiki menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Realisasi Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada Gambar 1.2. Realisasi belanja tidak langsung dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan, namun dari sisi belanja langsung terjadi fluktuasi, dari tahun 2005 ke tahun 2006 mengalami penurunan sebesar 21 persen, namun dari tahun 2006 sampai tahun 2008 mengalami kenaikan lagi disetiap tahunnya, tetapi dari tahun 2008 ke tahun 2009 mengalami penurunan lagi sebesar 12 persen.

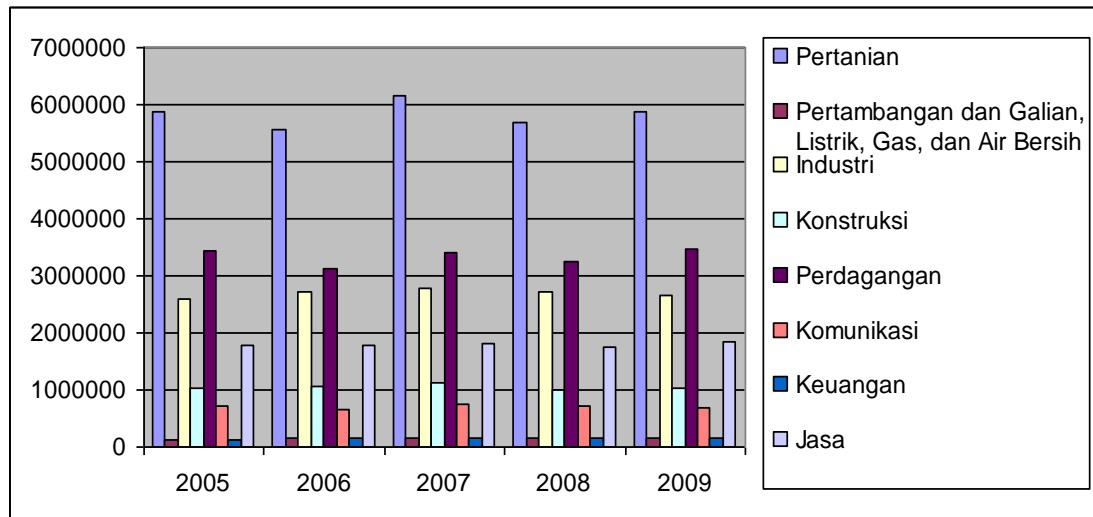
Gambar 1.2
Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005-2009 (ribu rupiah)



Sumber: BPS, diolah

Faktor lain yang dapat mempengaruhi output adalah sumber daya manusia, yang terefleksikan dengan penduduk yang bekerja. Jumlah penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi bila tidak diimbangi dengan peningkatan produksi, namun disisi lain, penduduk yang bertambah akan menambah jumlah tenaga kerja, dan penambahan tersebut memungkinkan suatu daerah untuk menambah produksi. Jika pertambahan jumlah penduduk tidak seimbang dengan faktor produksi lain yang juga terjadi penambahan tenaga kerja maka tidak akan menimbulkan penambahan dalam tingkat produksi (Amin Pujiati). Berdasarkan Gambar 1.3 jumlah penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha paling besar yaitu disektor pertanian, disetiap tahunnya sektor pertanian selalu menduduki peringkat pertama dalam penyerapan tenaga kerja.

Gambar 1.3
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Jawa Tengah Tahun 2005-2009 (orang)



Sumber: BPS, diolah

Tetapi tidak semua daerah yang dengan karakteristik tenaga kerja terserap yang cukup tinggi memiliki PDRB atau output daerah yang tinggi pula. Di Jawa Tengah, PDRB tertinggi dimiliki sektor industri sedangkan untuk tenaga kerja yang terserap terbanyak adalah sektor pertanian.

Provinsi Jawa Tengah memiliki nilai pendapatan per kapita terendah dibandingkan provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan output Provinsi Jawa Tengah pun selalu meningkat dan sektor industri pengolahan memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Jawa Tengah. Belanja daerah sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi output diklasifikasikan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sedangkan belanja langsung mengalami fluktuasi. Faktor lain yang mempengaruhi output suatu daerah adalah tenaga kerja, dalam penelitian ini menggunakan angkatan kerja yang bekerja karena secara langsung berpengaruh

pada jumlah produksi yang dihasilkan. Angkatan kerja yang bekerja di Jawa Tengah paling besar terserap di sektor pertanian.

Berdasarkan data di atas, maka penyusunan skripsi ini dipilih judul **Pengaruh Realisasi Belanja Daerah dan Angkatan Kerja terhadap Output dan Pendapatan Per Kapita (Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah).**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan per kapita di Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah terendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Pulau Jawa lainnya walaupun mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan nilai output pun meningkat untuk setiap tahunnya. Belanja daerah yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi output daerah mengalami fluktuasi. Belanja tidak langsung selalu meningkat disetiap tahunnya, namun belanja langsung mengalami penurunan pada tahun 2006 dan meningkat kembali pada tahun 2009. Angkatan kerja yang bekerja juga mengalami fluktuasi, namun penyerapan tenaga kerja terbesar tetap pada sektor pertanian. Untuk itu diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh belanja tidak langsung terhadap output (PDRB)?
2. Bagaimana pengaruh belanja langsung terhadap output (PDRB)?
3. Bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap output (PDRB)?
4. Bagaimana pengaruh output terhadap pendapatan per kapita?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh belanja tidak langsung terhadap output.
2. Menganalisis pengaruh belanja langsung terhadap output.
3. Menganalisis pengaruh tenaga kerja terhadap output.
4. Menganalisis pengaruh output terhadap pendapatan per kapita.

b. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini :

1. Menjadi masukan kepada pihak terkait terutama Kementerian Keuangan Indonesia.
2. Sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.
3. Sebagai bahan penelitian lebih lanjut.

1.4 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun menjadi 5 (lima) bab dengan urutan penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian ini mengenai pendapatn per kapita di Jawa Tengah, dimana dipengaruhi oleh output (PDRB) dan output dipengaruhi oleh belanja daerah dan angkatan kerja yang bekerja. Belanja daerah dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi

belanja langsung dan belanja tidak langsung. Selanjutnya dirumuskan permasalahan penelitian yang berupa pertanyaan kajian. Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka dikemukakan tujuan dan kegunaan penelitian. Pada bagian akhir bab ini akan dijabarkan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori dan penelitian terdahulu yang melandasi penelitian ini. Dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pendapatan per kapita, output (PDRB), konsep ketenagakerjaan, dan teori pengeluaran pemerintah. Berdasarkan teori dan hasil penelitian-penelitian terdahulu, maka akan terbentuk suatu kerangka pemikiran dan penentuan hipotesis awal yang akan diuji.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang variabel dan definisi operasional variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pendapatan per katipa atas dasar harga berlaku tanpa migas, PDRB atas dasar harga berlaku tanpa migas, angkatan kerja yang bekerja, belanja langsung, dan belanja tidak langsung. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan metode analisis dalam penelitian ini menggunakan model analisis jalur.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian. Selain itu, bab ini juga menguraikan mengenai analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dan pembahasan mengenai hasil analisis dari objek penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari tiga bagian; pertama merupakan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis, kedua merupakan keterbatasan yang dialami penulis dalam melakukan penelitian, ketiga adalah saran yang direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu atas dasar penelitian.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah” Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan dengan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi; hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Otonomi daerah yang sudah berjalan lebih dari sepuluh tahun diharapkan bukan hanya pelimpahan wewenang dari pusat ke kota untuk menggeser kekuasaan. Hal ini ditegaskan oleh Kaloh (2002), bahwa otonomi daerah harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah bukan otonomi “daerah” dalam pengertian wilayah/teritorial tertentu ditingkat lokal. Otonomi Daerah bukan hanya merupakan pelimpahan wewenang tetapi juga untuk peningkatan partisipasi

masyarakat dalam pembangunan daerah. Selain berbagai manfaat yang dapat diambil dari berlakunya Otonomi Daerah di Indonesia, ada berbagai kelemahan yang muncul dari diberlakukannya Otonomi Daerah yang harus diwaspadai. Prud'homme (1995) mencatat beberapa kelemahan dan dilema otonomi daerah, antara lain:

- a. Menciptakan kesenjangan antara daerah kaya dan miskin
- b. Mengancam stabilitas ekonomi akibat tidak efisiennya kebijakan ekonomi makro, seperti kebijakan fiskal.
- c. Mengurangi efisiensi akibat kurang representatifnya lembaga perwakilan rakyat dengan indikator masih lemahnya *public hearing*.
- d. Perluasan jaringan korupsi dari pusat menuju daerah

2.1.2 Desentralisasi Fiskal Daerah

Implikasi langsung dari kewenangan/fungsi yang diserahkan kepada daerah adalah kebutuhan dana yang cukup besar. Untuk itu, perlu diatur perimbangan keuangan (hubungan keuangan antar pusat dan daerah) yang dimaksud untuk membiayai tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Kebijakan perimbangan keuangan antar pusat dan daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau *money follows function*. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada.

Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan di atas maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan azas desentralisasi,

dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan azas desentralisasi dilakukan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan azas dekonsentrasi dilakukan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.

2.1.3 Pendapatan Per Kapita

Todaro (2003:18) menyebutkan bahwa pendapatan per kapita pada dasarnya mengukur kemampuan dari suatu negara untuk memperbesar outputnya dalam laju yang lebih cepat daripada tingkat pertumbuhan penduduknya. Tingkat dan laju pertumbuhan pendapatan per kapita sering digunakan untuk mengukur kemakmuran suatu negara, yaitu seberapa banyak barang dan jasa yang tersedia bagi rata-rata penduduk untuk melakukan kegiatan konsumsi dan investasi.

Pendapatan per kapita (Y_{capita}) dapat dihitung dengan:

$$Y_{capita} = \frac{PDRB}{\text{jumlah penduduk}} \quad (2.2)$$

Pendapatan per kapita dipengaruhi oleh PDRB dan jumlah penduduk, dengan kata lain pendapatan per kapita mencerminkan pendapatan rata-rata yang diperoleh di suatu daerah, sehingga jika pendapatan tersebut besar masyarakat pun cenderung memiliki pengeluaran yang lebih besar untuk kebutuhannya, sehingga dapat memenuhi kebutuhannya (Kuncoro, 2004)

2.1.4 Output (Produk Domestik Regional Bruto)

Berdasarkan keyakinan bahwa perekonomian tidak akan menghadapi masalah kekurangan permintaan agregat, selanjutnya menurut ahli-ahli ekonomi klasik permintaan agregat ditentukan oleh kemampuan faktor-faktor produksi yang terdapat dalam perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa. Dalam suatu periode tertentu, misalnya setahun, tingkat teknologi dan jumlah barang-barang modal yang dianggap tetap jumlahnya. Dengan demikian pada dasarnya tingkat produksi nasional yang dapat diciptakan ditentukan oleh dua faktor (Sadono Sukirno, 2000) yaitu:

1. Tingkat kesempatan kerja yang dicapai dalam perekonomian
2. Kemampuan tenaga kerja dan faktor-faktor produksi lain untuk menghasilkan barang dan jasa.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah atau provinsi dalam periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah seluruh nilai tambah yang timbul dari berbagai kegiatan ekonomi di suatu wilayah, tanpa memperhatikan pemilikan atas faktor produksinya, apakah milik penduduk wilayah tersebut ataukah milik penduduk wilayah lain (Sadono Sukirno, 2000).

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar, dimana dalam penghitungan ini digunakan tahun 1993. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Badan Pusat Statistik menjelaskan untuk lebih jelas dalam penghitungan angka-angka PDRB ada tiga pendekatan yang kerap digunakan dalam melakukan perhitungan, yaitu :

- a. Menurut pendekatan produksi
- b. Menurut pendekatan pendapatan
- c. Menurut pendekatan pengeluaran

Pengertian PDRB dapat dilihat dari tiga pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Produksi

PDRB merupakan nilai produksi netto dari barang dan jasa yang dihasilkan daerah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi sembilan sektor lapangan usaha, yaitu sektor pertanian, pertambangan, perdagangan hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan jasa-jasa.

2. Pendekatan Pendapatan

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa yang diterima adalah upah, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan dikurangi pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam pengertian PDRB, kecuali balas jasa faktor produksi di atas termasuk pula komponen penyusutan dan pajak tak langsung netto. Seluruh komponen pendapatan ini secara sektoral disebut sebagai nilai tambah bruto.

3. Pendekatan Pengeluaran

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah semua komponen permintaan akhir seperti: pengukuran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi, pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok, dan ekspor netto.

Dalam penelitian ini PDRB diinterpretasikan menurut pendekatan produksi. Dalam perhitungan yang dijumlahkan adalah nilai tambah dari produksi atau *value added* yang diciptakan. Hal ini dilakukan untuk menghindari perhitungan dua kali, disamping itu juga akan menunjukkan sumbangan yang sebenarnya dari tiap-tiap sektor dalam menciptakan produksi nasional. Alasan ini yang mendasari penggunaan pendekatan ini adalah karena data statistik di Indonesia sampai saat ini masih menggunakan pendekatan produksi baik tingkat nasional maupun tingkat daerah

2.1.5 Konsep Ketenagakerjaan

Simanjuntak, 1998 menyebutkan tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah atau sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Pencari kerja, bersekolah, dan mengurus rumah tangga walaupun sedang tidak bekerja, mereka dianggap secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja. Pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja hanya dibedakan oleh batas umur.

Di Indonesia batasan umur tersebut adalah 10 tahun, dengan kata lain tenaga kerja adalah penduduk yang berusia 10 tahun atau lebih. Namun, apabila definisi tenaga kerja merupakan penduduk berumur 10 tahun atau lebih maka banyak jumlah penduduk dalam usia sekolah yang bekerja. Bila wajib belajar 9 tahun diterapkan maka anak-anak sampai berumur 14 tahun akan berada di sekolah dengan kata lain jumlah penduduk yang bekerja dalam batasan umur tersebut akan sangat sedikit, sehingga batas umur minimum diubah menjadi 15 tahun. Atas pertimbangan tersebut, Undang-Undang No. 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan telah menetapkan batas usia kerja menjadi 15 tahun yang mulai berlaku sejak 1 Oktober 1998.

Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari (1) golongan yang bekerja, (2) golongan yang menganggur. Sedangkan kelompok bukan angkatan kerja yaitu (1) golongan yang bersekolah, (2) golongan yang mengurus rumah tangga, (3) golongan yang sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja.

Dalam Raharjo (2004) menyebutkan dalam model sederhana tentang pertumbuhan ekonomi, pada umumnya pengertian tenaga kerja diartikan sebagai angkatan kerja yang bersifat homogen. Menurut Lewis, angkatan kerja yang homogen dan tidak terampil dianggap bisa bergerak dan beralih dari sektor tradisional ke sektor modern secara lancar dan dalam jumlah tidak terbatas. Dalam keadaan demikian, peranan tenaga kerja mengandung sifat elastis yang tinggi. Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja (dari sektor tradisional) bersumber pada ekspansi kegiatan sektor modern. Dengan demikian salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja.

Menurut Nicholson bahwa suatu fungsi produksi pada barang atau jasa proses yang dilakukan oleh perusahaan berupa kegiatan mengkombinasikan input (sumber daya) untuk menghasilkan output. Dengan kata lain produksi merupakan proses perubahan dari input menjadi output. Fungsi produksi selalu dinyatakan dalam bentuk rumus, yaitu

$$Q = f(K,L)$$

Dimana, Q adalah output, K adalah kapital (modal), dan L adalah tenaga kerja. Persamaan tersebut merupakan gambaran sederhana dan bersifat umum mengenai keterkaitan antar faktor-faktor produksi dan jumlah produksi. Persamaan tersebut menggambarkan bahwa tingkat produksi suatu barang tergantung pada jumlah modal dan jumlah tenaga kerja. Apabila salah satu masukan ditambah satu unit tambahan dan masukan lainnya dianggap tetap akan menyebabkan tambahan keluaran yang dapat diproduksi. Dengan kata lain apabila jumlah tenaga kerja ditambah sedang faktor produksi lain dipertahankan konstan,

maka pada awalnya akan menunjukkan peningkatan output, namun pada suatu tingkat tertentu akan memperlihatkan penurunan output serta setelah mencapai tingkat keluaran maksimum setiap penambahan tenaga kerja akan mengurangi keluaran.

Sumber daya atau input dikelompokkan menjadi sumber daya manusia, termasuk tenaga kerja dan kemampuan manajerial, modal (*capital*), tanah ataupun sumber daya alam. Adapun yang dimaksud dengan kemampuan manajerial adalah kemampuan yang dimiliki individu dalam melihat berbagai kemungkinan untuk mengkombinasikan sumber daya untuk menghasilkan output dengan cara yang lebih efisien, baik produk baru maupun produk yang sudah ada.

Dalam penelitian digunakan variabel angkatan kerja yang bekerja karena jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia dan mempengaruhi total produksi di suatu daerah.

2.1.6 Teori Pengeluaran Pemerintah

2.1.6.1 Pengeluaran Daerah

Pengeluaran daerah terdiri dari belanja tak langsung, belanja langsung, dan pengeluaran pembiayaan daerah. Belanja tak langsung meliputi bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja tak langsung terdiri dari : Belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang, Belanja bunga, Belanja hibah, Belanja bantuan sosial, Belanja bagi hasil kepada propinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, Belanja bantuan keuangan, serta Belanja tak tersangka. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program.

Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah.

Pengklasifikasian belanja ke dalam Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dibagi menjadi tiga, yaitu klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi yaitu pengelompokan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas yang dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja lain-lain/tak terduga. Belanj Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah, dan bantuan Sosial. Belanj Modal meliputi Belanja Aset Tetap, Belanja Aset Lainnya, sedangkan Belanja Tidak Terduga antara lain belanja untuk penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan belanja tidak terduga lainnya.

Pengklasifikasian belanja berdasarkan PP No. 58 tahun 2005 dan pembedagri No. 59 tahun 2007 sedikit berbeda dengan klasifikasi belanja menurut PP No. 24 Tahun 2005. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 2.1

Tabel 2.1
Klasifikasi Belanja Berdasarkan PP 24/2005 dan Pemendagri 59/2007

KETERANGAN	PP 58/2005 dan Permendagri 59/2007	PP 24 Tahun 2005
Dasar pengklasifikasian belanja	Belanja diklasifikasikan berdasarkan hubungannya dengan aktivitas, sehingga belanja dikelompokkan menjadi: 1. Belanja Tidak Langsung 2. Belanja Langsung	Belanja diklasifikasikan berdasarkan masa manfaat belanja, sehingga belanja dikelompokkan menjadi: 1. Belanja Operasi 2. Belanja Modal 3. Belanja tak Terduga
Jenis belanja	Jenis belanja untuk masing-masing kelompok belanja terdiri atas : Belanja tidak Langsung: <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Pegawai • Belanja Bunga • Belanja Subsidi • Belanja Hibah • Belanja Bantuan Keuangan • Belanja bantuan sosial • Belanja Tak Terduga Belanja Langsung <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Pegawai • Belanja Modal • Belanja barang/jasa 	Jenis belanja untuk masing-masing kelompok adalah: Belanja operasional: <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Pegawai • Belanja Barang dan Jasa • Belanja Bunga • Belanja Subsidi • Belanja Hibah • Belanja Bantuan Keuangan • Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal : <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Aset tetap • Belanja Aset Lainnya • Belanja Tidak Terduga
Transfer ke kab/kota/desa	Dimasukkan dalam Belanja Tidak Langsung yaitu Belanja Bantuan Keuangan	Tidak dimasukkan dalam Belanja Operasi tetapi dipisahkan tersendiri dalam pos Transfer
Pengakuan belanja modal dalam neraca	Barang modal yang diakui/dicatat dalam neraca adalah sebesar nilai barang modalnya saja, tidak termasuk biaya pengadaannya. Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa yang terkait dengan pengadaan barang modal tidak diakumulasikan dalam barang modal	Barang modal yang diakui/dicatat dalam neraca meliputi nilai barang modal yang dibeli/diadakan ditambah dengan biaya-biaya yang terjadi terkait dengan pengadaan barang modal.

Sumber : Mahmudi, 2010

PP No. 58 Tahun 2005 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 lebih menunjukkan untuk pengelolaan keuangan oleh pihak internal pemerintah daerah (eksekutif), sedangkan PP No. 24 Tahun 2005 lebih ditunjukkan untuk laporan keuangan untuk pihak eksternal.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. (Mangkoesoebroto, 1994)

Pengeluaran pemerintah mempunyai dasar teori yang dapat dilihat dari identitas keseimbangan pendapatan nasional yaitu $Y = C + I + G + (X-M)$ yang merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Dari persamaan diatas dapat ditelaah bahwa kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan menaikkan atau menurunkan pendapatan nasional. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya. Tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati kebijaksanaan tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak memadai. Melainkan harus diperhitungkan siapa yang akan terpekerjakan atau meningkat pendapatannya. Pemerintah pun perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak melemahkan kegiatan pihak swasta. (Dumairy, 1997)

Teori mengenai pengeluaran pemerintah juga dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu teori makro dan teori mikro. (Mangkoesoebroto, 1994)

2.1.6.2 Teori Makro Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. (Suparmoko,1987)

Mangkoesoebroto (2008:169) menyebutkan bahwa teori makro mengenai perkembangan pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonom dapat digolongkan dalam tiga golongan; yaitu:

1. Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap akhir. Pada tahap awal disebut perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sebagainya. Pada tahap menengah atau tahap pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Pada tahap ini peranan pemerintah masih tetap besar, namun karena peranan swasta yang semakin besar dapat menimbulkan kegagalan pasar, dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa

publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Selain itu, perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antarsektor yang semakin rumit, misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri, menimbulkan semakin tingginya tingkat pencemaran udara dan air, dan pemerintah harus turun tangan untuk mengatur dan mengurangi akibat negatif dari itu terhadap masyarakat.

Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya.

Teori yang dikemukakan oleh Rostow dan Musgrave adalah suatu pandangan yang timbul dari pengamatan berdasarkan pembangunan ekonomi yang dialami oleh banyak negara, tetapi tidak didasarkan oleh suatu teori tertentu. Selain itu, tidak jelas, apakah tahap pertumbuhan ekonomi terjadi dalam tahap demi tahap ataukah beberapa tahap dapat terjadi secara simultan.

2. Hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap GNP yang juga didasarkan pula pengamatan di negara-negara Eropa, U.S., dan Jepang pada abad ke-19. Wagner mengemukakan pendapatnya dalam suatu hukum, akan tetapi dalam pandangan tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan pengeluaran pemerintah dan GNP, apakah dalam pengertian pertumbuhan secara relatif ataukah secara absolut. Apabila yang dimaksud oleh Wagner adalah

perkembangan pengeluaran pemerintah secara relatif seperti teori Musgrave, maka hukum Wagner adalah sebagai berikut : Dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat.

Dasar dari hukum tersebut adalah pengamatan empiris dari negara-negara maju (USA, German, Jepang), tetapi hukum tersebut memberi dasar akan timbulnya kegagalan pasar dan eksternalitas. Wagner menyadari bahwa dengan bertumbuhnya perekonomian hubungan antara industri dengan industri, hubungan industri dengan masyarakat dan sebagainya menjadi semakin rumit atau kompleks. Dalam hal ini Wagner menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, yang terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan, dan sebagainya.

Kelemahan hukum Wagner adalah karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik. Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut teori organism mengenai pemerintah (*organic theory of state*) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya.

Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{PkPP}{PPK1} < \frac{PkPP2}{PPK2} < \dots < \frac{PkPPn}{PPKn} \quad (2.3)$$

Dimana:

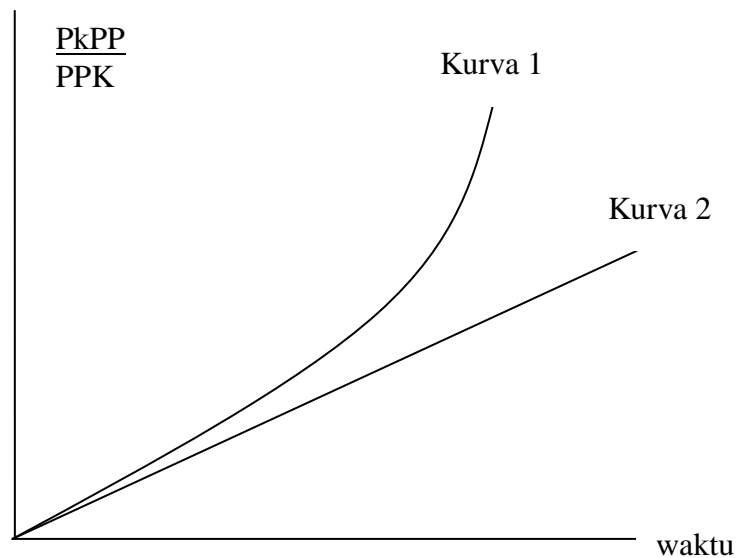
PkPP : Pengeluarn pemerintah per kapita

PPK : pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah penduduk

1, 2, ... n : jangka waktu (tahun)

Hukum Wagner ditunjukkan dalam Gambar 2.1 di bawah ini, dimana kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial yang ditunjukkan oleh kurva 1 dan bukan seperti ditunjukkan oleh kurva 2.

Gambar 2.1
Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah menurut Wagner



Sumber: Mangkoesobroto, 2008

3. Teori Peacock & Wiseman

Peacock dan Wiseman adalah dua orang yang mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Teori mereka didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut, sehingga teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar dari teori pemungutan suara. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu

tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai suatu tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi pajak ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena. Teori Peacock dan Wiseman adalah sebagai berikut:

Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GDP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

2.1.7 Hubungan Output dengan Pendapatan per Kapita

Todaro (2003 : 18) menyebutkan bahwa pendapatan per kapita pada dasarnya mengukur kemampuan dari suatu negara untuk memperbesar outputnya dalam laju pertumbuhan pendapatan per kapita riil sering digunakan untuk mengukur kemakmuran suatu negara.

Pendapatan per kapita dihitung dengan perbandingan PDRB dengan jumlah penduduk. PDRB merupakan output di suatu daerah. PDRB sering digunakan sebagai salah satu indikator pertumbuhan ekonomi. PDRB dan pendapatan per kapita memiliki hubungan yang positif, sehingga jika PDRB mengalami kenaikan maka pendapatan per kapita pun akan semakin besar.

2.1.8 Hubungan Angkatan Kerja dengan Output

Tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah atau sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Pencari kerja, bersekolah, dan mengurus rumah tangga walaupun sedang tidak bekerja, mereka dianggap secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja. Pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja hanya dibedakan oleh batas umur.

Sumber daya atau input dikelompokkan menjadi sumber daya manusia, termasuk tenaga kerja dan kemampuan manajerial, modal (*capital*), tanah ataupun sumber daya alam. Adapun yang dimaksud dengan kemampuan manajerial adalah kemampuan yang dimiliki individu dalam melihat berbagai kemungkinan untuk mengkombinasikan sumber daya untuk menghasilkan output dengan cara yang lebih efisien, baik produk baru maupun produk yang sudah ada.

Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambah besar lapangan kerja yang tersedia, maka akan menyebabkan semakin meningkatnya total produksi di suatu daerah. (Kuncoro, 2004)

2.1.9 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Output

Belanja pada umumnya hanya digunakan di sektor publik, tidak di sektor bisnis. Belanja di sektor publik terkait dengan penganggaran, yaitu menunjukkan jumlah uang yang telah dikeluarkan selama satu tahun anggaran. Belanja/biaya berdasarkan hubungannya dengan aktivitas di bagi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Pengklasifikasian tersebut berdasarkan PP No. 15 Tahun

2000 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yang kemudian direvisi menjadi PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 sebagai revisi Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, belanja daerah diklasifikasikan menjadi Belanja Administrasi Umum (BAU), Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP), belanja Modal, Belanja Tidak tersangka, dan Belanja Bantuan Keuangan. Sedangkan berdasarkan peraturan yang baru yaitu Permendagri No. 59 Tahun 2007 (Revisi atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah), klasifikasi belanja diperbaiki dan dikelompokkan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung yaitu belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan. Suatu kegiatan tidak akan terlaksana tanpa adanya biaya tersebut. Sedangkan belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan.

Teori Peacock dan Wiseman menyebutkan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GDP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Maka pengeluaran pemerintah yang diklasifikasikan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung jika meningkat maka menyebabkan GNP (dalam penelitian ini adalah output) meningkat pula.

2.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti / Judul	Variabel Endogen (Dependen)	Variabel Eksogen (Independen)	Hasil
1.	Hadi Sasana, 2009 “Peran Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah”	Y1 = pertumbuhan ekonomi Y2 = tenaga kerja terserap Y3 = jumlah penduduk miskin Y4 = kesejahteraan	X1 : desentralisasi fiskal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi di daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah 2. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap tenaga kerja terserap di kabupaten/kota di Jawa Tengah 3. Pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota di Jawa Tengah 4. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Jawa Tengah

				<p>5. Tenaga kerja terserap berpengaruh secara signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Jawa Tengah</p> <p>6. Jumlah penduduk miskin berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Jawa Tengah</p>
2.	<p>Adi Raharjo, 2006</p> <p>“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi swasta, dan Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi“</p>	<p>LY= Pertumbuhan Ekonomi</p>	<p>LG_t = belanja rutin pemerintah pada tahun t</p> <p>LIG_t = Belanja Pembangunan Pemerintah pada tahun t</p> <p>LIP_t = Investasi Swasta pada tahun t</p> <p>LL_t = Angkatan Kerja pada tahun t</p>	<p>1. Pengaruh belanja rutin pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil yang positif dan signifikan.</p> <p>2. Pengaruh belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Semarang menunjukkan hasil yang positif namun tidak signifikan.</p> <p>3. Pengaruh investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Semarang menunjukkan hasil yang positif dan signifikan.</p> <p>4. Pengaruh angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Semarang menunjukkan hasil yang</p>

				positif namun tidak signifikan.
3.	Suwandi, 2010 “Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan, ketenagakerjaan, dan Kemiskinan di Provinsi Papua”	<ul style="list-style-type: none"> - Belanja Langsung - Belanja tidak langsung - Pertumbuhan ekonomi - Kemiskinan - Penyerapan Tenaga kerja - Kesejahteraan 	<ul style="list-style-type: none"> - Desentralisasi fiskal - otonomi khusus Papua 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung 2. Desentralisasi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja tidak langsung 3. Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 4. Belanja Langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 5. Belanja Tidak Langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 6. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Induk Propinsi Papua 7. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Induk Propinsi Papua

				<p>8. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Induk Propinsi Papua</p> <p>9. Tenaga kerja terserap berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Induk Propinsi Papua</p> <p>10. Jumlah penduduk miskin berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Induk Propinsi Papua</p>
4.	Amin Pujiati “Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal”	Pertumbuhan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Dana Bagi Hasil - Pendapatan Asli Daerah - Dana Alokasi Umum - Tenaga Kerja 	<p>1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi</p> <p>2. Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi</p> <p>3. Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi</p> <p>4. Tenaga kerja berpengaruh signifikan dan positif</p>

				terhadap pertumbuhan ekonomi
5.	Priyo Hari Adi, 2006 ”Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan, dan Pendapatan Asli daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)”	- Pertumbuhan ekonomi - Pendapatan Asli Daerah	- Belanja Modal/Pembang unan	1. Belanja Pembangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 2. Belanja pembangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. 3. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.
6.	Imam Nugroho Heru Santoso (2005) “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang dan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah”,	- PDRB	- Investasi swasta - Angkatan kerja - Indeks harapan hidup - Variable dummy	1. Indeks harapan hidup berpengaruh signifikan dan positif terhadap PDRB. 2. Angkatan kerja berpengaruh signifikan dan positif terhadap PDRB. 3. Investasi swasta dan dummy secara individu tidak dapat menjelaskan pengaruhnya

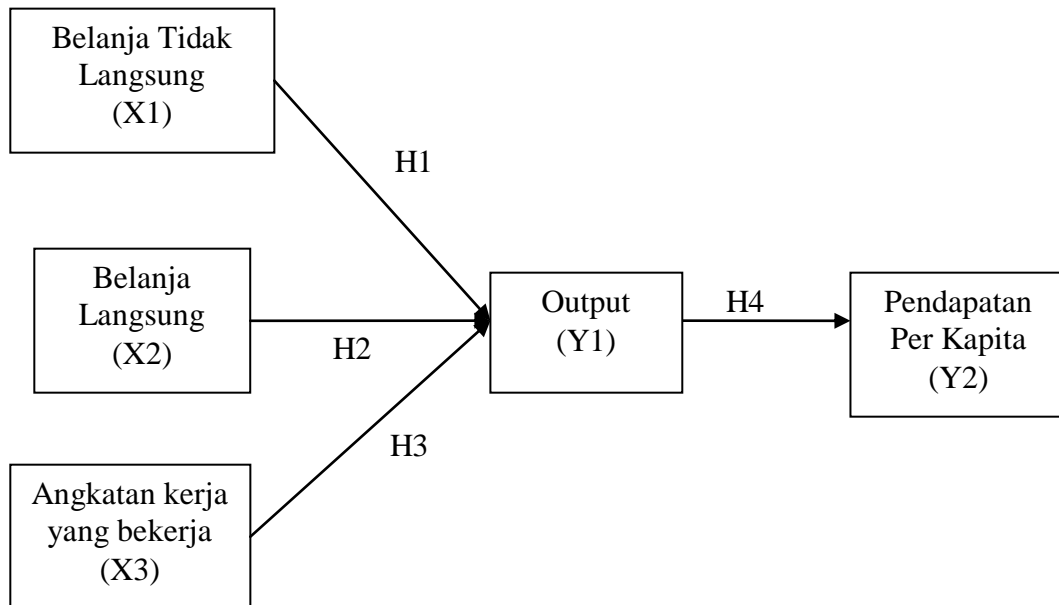
2.3 Kerangka Pemikiran

Pendapatan per kapita sering digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan. Pendapatan per kapita menggambarkan seberapa banyak barang dan jasa yang tersedia bagi rata-rata penduduk untuk melakukan kegiatan konsumsi dan investasi (Todaro, 2003). Pendapatan per kapita dipengaruhi oleh output (PDRB) dan jumlah penduduk. Output (PDRB) adalah seluruh nilai tambah yang timbul dari berbagai kegiatan ekonomi di suatu wilayah tanpa memperhatikan pemilik atas faktor produksinya, apakah milik penduduk wilayah tersebut atau milik penduduk wilayah lain (Sadono Sukirno, 2000) dalam penelitian ini digunakan PDRB atas dasar harga berlaku karena menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun.

Teori Pengeluaran Pemerintah menerangkan bahwa pengeluaran pemerintah (belanja daerah) mempengaruhi pendapatan daerah. Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 belanja daerah diklasifikasikan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan pemerintah sedangkan belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan pemerintah.

Selain dari faktor pengeluaran pemerintah, faktor sumber daya manusia juga mempengaruhi output dari suatu daerah. Faktor sumber daya manusia yang dimaksud adalah faktor tenaga kerja, dalam penelitian ini menggunakan angkatan kerja yang berkerja. Angkatan kerja yang bekerja yaitu penduduk berusia 10 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan usaha.

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran Teoritis



2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara atas jawaban penelitian karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan atas teori-teori yang relevan belum berdasarkan fakta-fakta.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka disusun hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diduga belanja tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap output dan pendapatan per kapita di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.
2. Diduga belanja langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap output dan pendapatan per kapita di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.

3. Diduga angkatan kerja yang bekerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap output dan pendapatan per kapita di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.
4. Diduga output berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan per kapita di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya penafsiran berbeda terhadap variabel penelitian ini, berikut dijelaskan definisi operasionalnya. Definisi variabel adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut (M. Nazir, 1998).

Penelitian ini terdapat dua variabel endogen (dependen) dan tiga variabel eksogen (independen). Variabel endogen dalam penelitian ini adalah output dan pendapatan per kapita, sedangkan untuk variabel eksogen adalah belanja langsung, belanja tidak langsung, dan angkatan kerja yang bekerja. Adapun definisi operasional untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Output (Y1)

Output adalah nilai bersih dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu daerah. Data output dalam penelitian ini diproksi dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2005-2009. PDRB yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan PDRB tanpa migas atas dasar harga berlaku digunakan PDRB atas dasar harga berlaku karena variabel eksogen dalam penelitian ini yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung mengikuti nilai mata uang yang berlaku (terkena inflasi). Variabel PDRB ini diukur dalam satuan juta rupiah.

2. Pendapatan per kapita (Y2)

Pendapatan per kapita merupakan total pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Diperoleh dari pembagian PDRB tanpa migas dengan jumlah penduduk. Data diperoleh dari Jawa Tengah dalam Angka di BPS, dalam satuan rupiah.

Pendapatan per kapita diperoleh dari rumus:

$$\frac{\text{PDRB tanpa migas atas dasar harga berlaku}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

3. Belanja Tidak Langsung (X1)

Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan pemerintah. Yang termasuk kedalam belanja tidak langsung adalah belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan keuangan, belanja banuan sosial, belanja tidak terduga dan ditunjukkan dalam satuan ribu rupiah.

4. Belanja Langsung (X2)

Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan pemerintah. Belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal dalam satuan ribu rupiah.

5. Angkatan Kerja yang Bekerja (X3)

Angkatan Kerja yang bekerja dalam penelitian ini adalah data jumlah penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh upah, dimasing-masing kabupaten/kota Provinsi Jawa tengah dalam satuan orang.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu dokumen data yang ada pada BPS, Dinas atau Instansi terkait dan literatur serta data-data lain yang dapat menunjang terselesaikannya penelitian ini menggunakan data series tahun 2005 sampai dengan 2009. Data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- a. Data PDRB non migas atas dasar harga berlaku Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2004-2009
- b. Data pendapatan per kapita non migas atas dasar harga berlaku Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2004-2009
- c. Data Belanja Langsung Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2004-2009
- d. Data Belanja Tidak Langsung Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2004-2009
- e. Data Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2004-2009

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan cara melakukan pengamatan data dari literatur – literatur dan buku – buku yang mendukung. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS)

- b. Data atau informasi yang diperoleh dari buku referensi, jurnal, majalah, surat kabar yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4 Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *path analysis*, yang dikembangkan sebagai model untuk mempelajari pengaruh secara langsung maupun tidak langsung dari variabel eksogen terhadap variabel endogen. Bentuk hubungan sebab akibat yang muncul menggunakan model yang cukup kompleks, yaitu ada dua variabel yang berperan sebagai variabel endogen pada suatu hubungan. Dalam penelitian ini menggunakan lag 1, karena pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen tidak terjadi dalam waktu yang bersamaan tetapi ada selang waktu satu tahun. Penelitian ini menggunakan software LISREL.

Tahapan analisis ini terdiri dari spesifikasi model dan asumsi yang harus dipenuhi dalam LISREL.

3.4.1 Spesifikasi Model

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penelitian ini akan menggunakan model ekonometrika berdasarkan pada pengembangan teori sebagai berikut:

$$Y_{1(t)} = \alpha_1 X_{1(t-1)} + \alpha_2 X_{2(t-1)} + \alpha_3 X_{3(t)} + \mu_1$$

$$Y_{2(t)} = \beta_1 Y_{1(t)} + \mu_2$$

Dimana:

$X_{1(t-1)}$ adalah belanja tidak langsung pada t-1

$X_{2(t-1)}$ adalah belanja langsung pada t-1

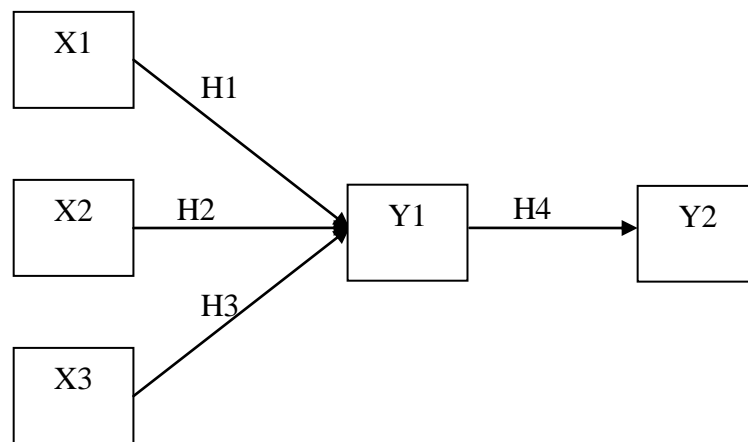
$X_{3(t)}$ adalah angkatan kerja yang bekerja pada tahun t

$Y_{1(t)}$ adalah output pada tahun t

$Y_{2(t)}$ adalah pendapatan per kapita

Pengujian hipotesis penelitian menggunakan analisis jalur, yang dikembangkan sebagai model untuk mempelajari pengaruh langsung maupun tidak langsung dari variabel eksogen terhadap variabel endogen.

Gambar 3.1
Path Diagram



3.4.2 Asumsi Analisis Jalur

1. Normalitas

Asumsi yang paling fundamental dalam analisis multivariate adalah normalitas, yang merupakan bentuk suatu distribusi data pada suatu variabel metrik tunggal dalam menghasilkan distribusi normal (Hair, 1998). Suatu distribusi data yang tidak akan membentuk distribusi normal, maka data tersebut tidak normal, sebaliknya data dikatakan normal apabila ia membentuk suatu distribusi normal. Apabila asumsi normalitas ini tidak dipenuhi dan penyimpangan normalitas tersebut besar, maka seluruh hasil uji statistik adalah

tidak valid karena perhitungan uji t dan lain sebagainya, dihitung dengan asumsi data normal yaitu *univariate normality* (normalitas univariate). Suatu data dikatakan terbebas dari *univariate normality* apabila memiliki p-value Skewness dan Kurtosis yang tidak signifikan (lebih besar daripada 0.05)

2. *Multicollinearity*

Sama seperti halnya pada analisis *multivariate* lainnya, salah satu asumsi yang seharusnya dipenuhi adalah *Multicollinearity* mengharuskan tidak adanya korelasi sempurna atau besar diantara variabel-variabel independen. Nilai korelasi antara variabel observed yang tidak diperbolehkan adalah sebesar 0,9 atau lebih.

3.4.2 **Goodness of Fit Model**

Uji terhadap kelayakan model analisis Jalur ini diuji dengan menggunakan Chi square, Probability, CFI, TLI, GFI, AGFI dan RMSEA.

1. Chi-Square dan Probabilitas

Nilai chi-square ini menunjukkan adanya penyimpangan antara *sample covariance matrix* dan *model (fitted) covariance matrix*. Namun, nilai chi-square hanya akan valid apabila asumsi normalitas data terpenuhi dan ukuran sampel adalah besar (Joreskog dan Sorbom, 1993; Joreskog dan Sorbon, 1996; Hair et al. 1998; Joreskog 2002; dalam Ghozali, 2008). Chi-square ini merupakan ukuran mengenai fit atau tidaknya suatu model. Nilai chi-square sebesar 0 menunjukkan bahwa model memiliki fit yang sempurna.

P adalah probabilitas untuk memperoleh penyimpangan (deviasi) besar sebagaimana ditunjukkan oleh nilai chi-square. Sehingga, nilai chi-square yg signifikan (kurang daripada 0,05) menunjukkan bahwa data empiris yang

diperoleh memiliki perbedaan dengan teori yang telah dibangun berdasarkan *structural equation modelling*. Sedangkan nilai probabilitas yang tidak signifikan adalah yang diharapkan, yang menunjukkan bahwa data empiris sesuai dengan model.

2. *Comparative Fit Index (CIF)*

CIF merupakan salah satu alternatif untuk menentukan model fit. Suatu model dikatakan fit apabila memiliki nilai CIF lebih besar daripada 0,9 (Bentler, 1992)

3. *Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)*

RMSEA mengukur penyimpangan nilai parameter pada suatu model dengan matriks kovarians populasinya (Browne dan Cudeck, 1993).

Nilai RMSEA yang kurang daripada 0,05 mengindikasikan adanya model fit, dan nilai RMSEA yang berkisar antara 0,08 menyatakan bahwa model memiliki perkiraan kesalahan yang *reasonable* (Byrne, 1998). Sedangkan MacCallum et al. (1996) menyatakan bahwa RMSEA berkisar antara 0,08 sampai dengan 0,1 menyatakan bahwa model memiliki fit yang cukup, sedangkan RMSEA yang lebih besar daripada 0,1 mengindikasikan model fit yang jelek.

4. *Goodness of Fit Indices (GFI)*

Goodness of fit indices (GFI) merupakan suatu ukuran mengenai ketepatan model dalam menghasilkan observed matriks kovarians. Nilai GFI ini harus berkisar antara 0 sampai 1. Meskipun secara teori GFI mungkin memiliki nilai negative tetapi hal tersebut seharusnya tidak terjadi, karena model yang memiliki nilai GFI negative adalah model yang paling buruk dari seluruh model

yang ada (Joreskog dan Sorbom, 1993;1996, dalam Ghozali, 2008). Nilai GFI yang lebih besar daripada 0,09 menunjukkan fit suatu model yang baik (Diamantopaulus dan Siguaw, 2000).

5. *Adjusted Goodness of Fit Index* (AGFI)

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) adalah sama seperti GFI, tetapi telah menyesuaikan pengaruh *degrees of freedom* pada suatu model. Sama seperti GFI, nilai GFI sebesar 1 berarti bahwa model memiliki *perfect fit*. Sedangkan model yang fit adalah yangmemiliki nilai AGFI sebesar 0,9 (Diamantopaulus dan Siguaw, 2000).